

(14)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A.8

TAHUN 2008

Gubernur Tutup Perusahaan Tambang Intan

BANJARMASIN — Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin menutup sementara perusahaan pertambangan intan di Kelurahan Palm, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yakni PT Galuh Cempaka. Perusahaan itu membuang limbah cairnya ke kali sehingga merusak lingkungan.

Menurut Rudi, surat teguran penutupan sementara telah dikirim kepada perusahaan itu pada 3 April. "Apabila dalam waktu setahun tidak ada upaya perbaikan dalam mengelola limbah cair, kami merekomendasikan perusahaan itu ditutup secara permanen," ujarnya.

Menurut aturan, kata Rudi, penutupan dan pencabutan izin perusahaan pertambangan intan merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Gubernur hanya merekomendasikan pencabutan izin.

Selama setahun pihaknya akan memantau secara ketat upaya perbaikan perusahaan itu dalam mengolah limbah. "Selama dalam pengawasan, apabila melakukan eksploitasi, perusahaan itu akan diberi sanksi pidana," kata Rudi.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan setempat, terungkap perusahaan itu membuang limbah cair berupa bahan kimia, seperti limbah besi dan timbal yang melebihi ambang batas ke kali di sekitarnya. Sebagai akibatnya, ratusan hektare sawah rusak. Setelah dicek, perusahaan itu juga tidak memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kalimantan Selatan Rachmadi Kurdi mengatakan penutupan sementara PT Galuh adalah untuk menegakkan aturan dan menimbulkan efek jera. Kuasa hukum PT Galuh, F. Abby, mengatakan, penutupan sementara kegiatan perusahaan adalah hak administratif gubernur. "Kami akan menaatinya," ujarnya. Namun, kata dia, penutupan itu akan berdampak pada 524 tenaga kerja dan 300 pekerja subkontraktor yang terpaksa diliburkan. ● KHAIIDIR RAHMAN

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Arutmin Targetkan Produksi 19,2 Juta Ton Batubara

SATUI-PT Arutmin Indonesia menargetkan peningkatan produksi batubara sebesar 19,2 juta ton pada 2008. Peningkatan produksi batubara tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan ekspor batubara kalori tinggi.

"Sebagian besar untuk ekspor, sisanya untuk konsumsi dalam negeri," ujar *Administrator & Land Acquisition Superintendent* PT Arutmin Indonesia Noval Zaruqi di lokasi tambang Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, akhir pekan lalu.

Noval menjelaskan, manajemen Arutmin menargetkan sekitar 70% dari 19,2 juta ton batubara yang diproduksi be-

rupa kalori tinggi yang diprioritaskan untuk ekspor. Sementara itu, sisanya sekitar 20-30% yang berkalori rendah, diperuntukkan bagi pasokan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap PLN.

Tahun ini, target produksi Arutmin akan difokuskan di tambang Satui. Pasalnya, sebagian besar produksi batubara terutama berkalori tinggi berasal dari tambang Satui.

"Untuk tambang Satui, ditargetkan mencapai 10 juta ton, 6 juta ton berkalori tinggi sedangkan sisanya berkalori rendah," ungkapnya.

Tahun lalu produksi batubara Arutmin hanya mencapai 15 juta ton atau meleset

2,9 juta ton dari proyeksi. Penurunan realisasi produksi batubara itu disebabkan faktor cuaca yang kurang mendukung. "Curah hujan yang tinggi mengakibatkan produksi agak menurun tahun lalu," katanya.

Public Relations Arutmin Zainuddin JR Lubis mengatakan, kendati fokus produksi Arutmin tahun ini masih untuk kebutuhan ekspor, ke depan hal tersebut bisa bergeser. Hal ini berkaitan dengan program percepatan pembangkit listrik nasional 10.000 MW yang akan mulai secara bertahap pada akhir 2009. Arutmin adalah salah satu perusahaan tambang nasional yang di-

tunjuk sebagai pemasok batubara kalori rendah.

"Ke depan Arutmin akan fokus pada produksi batubara kalori rendah, unuk proyek PLTU bersama PLN," ujar dia.

Di samping itu, proyek *up-grade brown coal* (UBC) yang dapat meningkatkan mutu dan kalori batubara hasil kerja sama pemerintah Jepang dan Indonesia juga merupakan alasan bergesernya fokus produksi Arutmin.

Lubis menjelaskan, produk UBC merupakan produk batubara yang telah ditingkatkan kalornya dari semula batubara berkalori rendah 4.200 kkal per kg menjadi berkalori 6.200-6.500 kkal. (c109)

45

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

Bumi Naikkan Target Harga Jual Batubara Sebesar 20%

MELIHAT tingginya permintaan batubara, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) merevisi prediksi harga jual rata-rata batubaranya menjadi US\$ 77 per ton, naik 20% dari prediksi BUMI sebelumnya sebesar US\$ 64 per ton. "Sementara target volume penjualan kami tahun ini tetap 62 juta ton, naik dari volume penjualan tahun lalu yang 55,4 juta ton," ujar Direktur Hubungan Investor Dileep Srivastava dalam siaran persnya, kemarin (9/4).

Bulan ini BUMI berharap kesepakatan harga jual dengan pelanggan di Jepang bisa terbentuk. Kesepakatan ini penting karena pelanggan di Jepang menguasai 25% dari total penjualan batubara BUMI. "Kami berharap harga patokannya bisa naik dari US\$ 65 per ton tahun lalu jadi US\$ 120 - US\$ 130 per ton tahun ini," lanjut Dileep. Harga jual patokan ini biasa digunakan untuk batubara yang mengandung 6.322 kilokalori per kilogram. Dileep yakin targetnya tercapai karena harga kesepakatan pelanggan Jepang dengan pemasok Australia juga naik dua kali lipat.

Gloria Haraito

46

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
--	--

KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
---	--	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Tambang Inkonvensional Harus Diatur

GUNA mewujudkan program *green mining* (kegiatan pertambangan yang memerhatikan lingkungan), pemerintah harus mengatur permintaan dan persediaan komoditas pertambangan. Salah satunya dengan mengatur dan menertibkan tambang-tambang inkonvensional. "Jangan sampai ada produksi yang digenjut besar-besaran saat harga tinggi seperti saat ini. Pasalnya, meski kaya barang tambang, itu kan tidak bisa diperbaharui," ujar Ketua Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo, di Jakarta, kemarin. Saat ini, banyak perusahaan pertambangan besar yang melakukan kegiatan tanpa memedulikan hal itu. Caranya, dengan menampung dan menerima produk tambang dari penambang-penambang kecil yang inkonvensional. Tujuannya, agar perusahaan tidak dibebani kewajiban memperbaiki lingkungan. (Pia/E-1)

47

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

MPI Harapkan RUU Minerba Bisa Tuntas Agustus Ini

Sigit Suhardi
NERACA

Jakarta - Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) berharap, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) bisa tuntas Agustus tahun ini, guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor tersebut.

"UU Pertambangan yang baru sangat dinantikan sebagai dasar aturan main yang baru dalam pengusahaan pertambangan," kata Ketua Presidium MPI, Herman Afif Kusumo kepada pers di Jakarta, Rabu kemarin, berkaitan penyelesaian *Indonesia Mining Updates 2008*, pekan depan.

Herman mengatakan, kalangan investor saat ini menunggu pemberlakuan regulasi itu karena bagi mereka sangat penting soal kepastian

hukum dan sinkronisasi peraturan para pemegang kewenangan baik pusat maupun daerah.

Secara umum, banyak pihak memandang RUU Pertambangan yang baru telah cukup mengakomodasi berbagai hal. Misalnya, kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat, Dati I dan Dati II dalam pemberian izin, aturan pengelolaan lingkungan, keharusan meningkatkan nilai tambah mineral dan promosi kepentingan nasional.

Ia tidak sependapat apabila RUU tersebut dinilai anti asing. "Memang secara umum ada keberpihakan pada nasional, itu wajar saja. Tetapi jika dikatakan anti asing tidak betul karena justru asing bisa masuk (investasi) hingga ke areal yang lebih kecil Kuasa Pertambangan (KP)," katanya.

Namun Herman menga-

kui bahwa RUU itu masih menyoal beberapa hal yang tampaknya menjadi kepedulian utama investor asing. Diantaranya tentang mekanisme kontrak yang berubah dari antara pemerintah dan swasta (G to B) menjadi swasta dengan swasta (B to B) serta bagaimana masa depan kontrak karya yang ada saat ini setelah UU baru diberlakukan.

Terlepas dari beberapa masalah yang mungkin muncul, UU Minerba memang harus segera diberlakukan sebagai pengganti UU No.11 Tahun 1967 yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, katanya.

"Hal itu dimaksudkan pula untuk mencegah praktek-praktek bisnis pertambangan yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan *grey area* hukum pertambangan kita," kata Herman Afif.

RUU Minerba yang diajukan oleh pemerintah mulai dibahas di DPR Mei 2005. RUU ini akan menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Dalam RUU ini, istilah kontrak karya (KK) antara investor dengan pemerintah telah dihapuskan dan diganti dengan izin.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR **APR** MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2008

KABUPATEN LAHAT

Lambung Energi yang Mulai Menggeliat

KABUPATEN Lahat, Sumatra Selatan, mulai menggeliat. Betapa tidak, sumber daya alam yang melimpah menjadi modal dasar bagi daerah yang berada sekitar 240 kilometer dari Kota Palembang itu.

Bupati Lahat Harunata optimistis sumber daya alam di daerah yang sudah dipimpinnnya selama dua periode itu mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Namun, bukan berarti tanpa kendala untuk menggapai sukses tersebut.

Untuk menggali lebih dalam kiat-kiat Kabupaten Lahat itu, wartawan *Media Indonesia*

Baharman mewawancarai Bupati Harunata, Selasa (8/4).

Berikut ini petikannya:

Seperti apa prospek pertambangan di Kabupaten Lahat?

Selain minyak dan gas, kami memiliki sumber energi atau tambang batu bara seluas 31 ribu hektare (ha). Tambang ini mampu menghasilkan batu bara sekitar 2,9 miliar metrik ton. Sumber energi ini diperkirakan baru habis sekitar 1.500 tahun lagi.

Apa langkah yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut?

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat telah memberikan izin kuasa pertambangan (KP) kepada lima perusahaan swasta yang akan

menggarap areal sekitar 14 ribu ha.

Semua perusahaan itu sudah eksploitasi?

Baru satu yakni, PT Batu Bara Lahat dengan izin KP seluas 500 ha. Tiga perusahaan masih tahap eksplorasi, sedangkan yang lainnya belum.

Bagaimana dengan BUMN PT Bukit Asam (PT BA)?

Kami akan berikan izin juga kalau mereka mengajukan KP dan memang betul-betul berniat melakukan eksploitasi di wilayah Lahat. Sesama anak bangsa mari kita bersama membangun untuk kesejahteraan rakyat. Kami tidak akan diskriminatif.

Tampaknya PT BA kecewa Anda berikan izin KP

kepada perusahaan swasta?

Sebetulnya, kekecewaan itu tidak beralasan. Sebab,

apa yang ada di bumi Lahat ini merupakan karunia Tuhan dan siapa pun boleh mengelolanya.

Bukankah area tambang untuk perusahaan swasta itu masih wilayah KP PT BA?

Perlu diketahui, izin KP yang diklaim masih dimiliki oleh PT BA berawal dari izin KP Eksplorasi KW97PP0350 pada 26 Oktober 1992 yang telah mendapatkan perpanjangan berkali-kali dan terakhir kalinya diperpanjang lagi berdasarkan SK Dirjen Pertambangan Umum No 609K/23.01/DJP/2000 tertanggal 03 November 2000. Masa berlaku selama tiga tahun hingga berakhir pada 25 Oktober 2003.

Hanya sampai di situ?

PT BA, kemudian mengajukan permohonan peningkatan KP Eksplorasi PT BA (KW97PP0350) menjadi KP eksploitasi dan mendapat izin KP eksploitasi berdasarkan Keputusan

Gubernur Sumsel No 461/KPTS/PERTAMBEN/2003 tertanggal 11 September 2003.

Namun, PT BA

tidak dapat memenuhi kewajibannya agar KP eksplorasi itu dapat ditingkatkan menjadi KP eksploitasi.

Kalau begitu apa sanksinya?

Akhirnya, Gubernur Sumsel Syahrial Oesman mengeluarkan keputusan Nomor 556/KPTS/PERTAMBEN/2004 tertanggal 20 Oktober 2004 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Sumsel Rosihan Arsyad Nomor 461/KPTS/PERTAMBEN/2003 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW DP.03.04.01.03).

Pascapencabutan izin itu apa yang dilakukan Pemkab Lahat?

Otomatis, pengelolaan perizinan KP menjadi kewenangan tiap bupati (Bupati Lahat dan Bupati Muara Enim), sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a PP No 75/2001.

Saya kemudian mengeluarkan Keputusan Bupati Lahat No 540/29/KEP/PERTAMBEN/2005 tertanggal 24 Januari 2005 tentang Penetapan Status Wilayah Eks Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.97.PP0350) dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.DP.16.03.04.01.03) PT Bukit Asam (persero) tbk, merupakan penegasan atas status wilayah eks KP PT BA yang terletak di Kabupaten Lahat dan kewenangan pengelolaan perizinannya yang dilaksanakan oleh Pemkab Lahat. (N-3)



Harunata
Bupati Lahat

■ M/BAHARMAN

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

PERTAMBANGAN UU Minerba Harus Segera Disahkan

JAKARTA (Suara Karya): Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) bisa tuntas pada Agustus tahun ini. Hal itu harus direalisasikan guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor tersebut. Sedikitnya tercatat tiga investor asing siap masuk, yakni Rio Tinto, BHP, dan satu perusahaan asal Rusia, jika UU Minerba disahkan.

"UU Pertambangan yang baru sangat dinantikan sebagai dasar aturan main dalam pengusahaan pertambangan," kata Ketua Presidium MPI, Herman Afif Kusumo, saat peluncuran penyenggaraan "Indonesia Mining Updates 2008" di Jakarta, Rabu (9/4).

Menurut dia, kalangan investor saat ini menunggu diberlakukannya regulasi terbaru karena sangat penting sebagai bentuk kepastian hukum dan sinkronisasi peraturan di tingkat pemegang kewenangan, baik pusat maupun daerah. Apalagi secara umum banyak pihak memandang RUU Pertambangan yang baru telah cukup mengakomodasi berbagai kepentingan. Misalnya, kejelasan kewe-

nangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pemberian izin, aturan pengelolaan lingkungan, keharusan meningkatkan nilai tambah mineral, dan promosi kepentingan nasional.

Namun, Herman menilai pihaknya tidak sependapat bila RUU tersebut dinilai antiasing. "Memang, secara umum ada keberpihakan kepada nasional, itu wajar saja. Tetapi jika dikatakan antiasing, tidak betul itu, karena justru asing bisa masuk (investasi) hingga ke area yang lebih kecil, yakni kuasa pertambangan (KP)," ujarnya.

Dia mengakui, RUU Minerba memang masih menyisakan beberapa hal yang t a m p a k n y a menjadi perhatian investor asing. Di antaranya tentang m e k a n i s m e kontrak yang berubah dari antara pemerintah dan swasta (G to B) menjadi swasta dengan swasta (B to B). Serta bagaimana masa

depan kontrak karya yang ada saat ini setelah UU baru diberlakukan.

Tapi, terlepas dari beberapa masalah yang mungkin muncul, lanjut dia, UU Minerba memang harus segera diberlakukan sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 1967 yang

sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. "Hal itu dimaksudkan pula untuk mencegah praktik-praktik bisnis pertambangan yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan *grey area* (ketidakjelasan) hukum pertambangan kita," tutur Herman Afif.

RUU Minerba yang diajukan oleh pemerintah mulai dibahas di DPR sejak Mei 2005. RUU ini akan menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Dalam RUU ini istilah kontrak karya (KK) antara investor dan pemerintah dihapus dan diganti dengan izin. Masa berlaku izin usaha pertambangan hanya 20 tahun atau lebih singkat dibanding dengan kontrak karya yang berlaku 30 tahun. Selain itu, luas wilayah pertambangan juga dibatasi. (Abdul Choir)

**RUU Minerba
memang
masih me-
nyisakan be-
berapa hal
yang tam-
paknya men-
jadi perhatian
investor
asing.**

50

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 22

TAHUN 2008

LINGKUNGAN

DPRD Sulut Tetap Tolak Tambang Emas MSM

MANADO, KOMPAS — Kebijakan Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral yang memperpanjang izin konstruksi dan eksplorasi tambang emas pada PT Meares Sopotan Mining atau PT MSM di kawasan perkebunan dan hutan lindung Likupang, Minahasa Utara, dan Bitung ditolak sebagian pemangku kepentingan di Sulawesi Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara tahun lalu telah memutuskan tidak mengizinkan PT MSM beroperasi di provinsi tersebut.

Anggota DPRD Sulut, Benny Ramdhani, Rabu (9/4) di Manado, mengatakan, keputusan DPRD ti-

dak akan ditinjau lagi karena menilai pengoperasian tambang emas merupakan kejahatan terhadap lingkungan. "Tidak ada sejangkal tanah pun di Likupang dan Bitung diizinkan untuk operasi tambang emas," katanya. Sikap DPRD Sulut sudah final dan mutlak yang diputuskan bersama dalam rapat paripurna 2007.

Menurut Ramdhani sejumlah warga penghuni lingkaran tambang dari 14 desa, antara lain Rinondoran, Kalinahu, Marinso, Pulisan, Wineru, Kampung Ambon Likupang, Likupang III, Kokole, telah mempersoalkan pengoperasian PT MSM; yakni soal ganti rugi tanah. Mereka khawatir eksplorasi tambang emas berdampak buruk bagi kehidupan pertanian dan laut yang mereka andalkan sebagai sumber kehidupan.

Direktur Walhi Sulut Carmelita Mamonto meminta Universitas Sam Ratulangi meninjau kembali hasil studi yang menyebutkan 80 persen rakyat lingkaran tambang menyetujui pengoperasian PT MSM. "Itu bohong. Ada penolakan besar-besaran masyarakat," katanya. (ZAL)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR **APR** MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

RUU Minerba Perlu Segera Diratifikasi

JAKARTA – Pemerintah dan legislatif diminta segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba). RUU tersebut dinilai telah cukup mengakomodasi kepentingan para pihak yang terkait dengan sektor pertambangan.

“Terlepas apa pun konsekuensinya, RUU Minerba harus segera disahkan menjadi UU. Alasannya, UU Pertambangan yang lama, yaitu UU No 11 Tahun 1967 sudah tidak relevan lagi,” ujar Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo di Jakarta, Rabu (9/4).

Herman mengatakan, secara substansi, aturan peralihan menjembatani masa transisi pelaksanaan pertambangan mengacu pada undang-undang lama dan baru. Kehadiran UU Pertambangan yang baru dapat mencegah praktik bisnis pertambangan yang tidak bertanggung jawab. “UU yang lama banyak *grey area*,” ujarnya.

Dia berharap, pembahasan RUU Minerba dapat diselesaikan sebelum Agustus 2008, sehingga mampu menjadi

daya tarik investor pertambangan untuk masuk ke Indonesia. Saat ini kalangan investor menantikan pemberlakuan regulasi. “Bagi mereka sangat penting soal kepastian hukum dan sinkronisasi peraturan para pemegang kewenangan baik pusat maupun daerah,” ujar dia.

Menurut Herman, banyak pihak memandang RUU Minerba cukup mengakomodasi berbagai hal. Misalnya, kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat, daerah tingkat I dan daerah tingkat II dalam pemberian izin. Selain itu, aturan pengelolaan lingkungan, keharusan meningkatkan nilai tambah mineral dan promosi kepentingan nasional.

Namun Herman mengakui bahwa RUU itu masih menyisakan beberapa hal yang menjadi kepedulian utama investor asing. Persoalan yang dipertanyakan investor asing adalah mekanisme kontrak yang berubah dari antara pemerintah dan swasta (*government to business/G to B*) menjadi swasta dengan swasta (*B to B*) serta bagaimana masa depan kontrak karya yang ada saat ini setelah UU baru diberlakukan. (*her/pya*)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6 1

TAHUN 2008

Investasi Rio Tinto terusik

Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Rencana kontrak karya (KK) nikel Lasamphala milik Rio Tinto di Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara) terganjal akibat kedua pemkab mengeluarkan izin kuasa pertambangan kepada Grup Bintangdelapan.

Pembka Morowali telah mengeluarkan lima izin kuasa pertambangan (KP) dan tiga izin lainnya masih berstatus usulan. Sementara itu, Pemkab Konawe sudah menerima tujuh permintaan KP dari grup yang sama melalui PT Panca Metta, PT Meltapratama Perkasa (dua KP), PT Bintangdelapan Wahana, dan PT Bintangdelapan Mineral.

Sekretaris Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Setiawan, mengatakan kasus tumpang tindih di Lasamphala antara Rio Tinto dan Grup Bintangdelapan telah dimediasi oleh Departemen Dalam Negeri.

"Namun, mediasi itu belum membuahkan hasil. Tumpang tindih itu mengancam kelanjutan kontrak karya Rio Tinto," tuturnya kemarin.

Perusahaan Australia itu telah mengajukan proposal KK di Lasamphala ke Departemen ESDM sejak 2001. Akibat tumpang tindih itu, menurut Bambang, jadwal proses pengajuan KK untuk dibahas dengan DPR sebelum ditandatangani pemerintah akhirnya terganjal. "Akibat kasus ini, draf kontrak karya belum masuk DPR."

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M. Lutfi mengatakan instansinya sudah membicarakan kasus tumpang tindih lahan itu dengan Menteri Dalam Negeri, selain meminta dituntaskannya kasus yang melibatkan dua pemkab tersebut.

Bahkan, lanjutnya, Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Pembangunan Daerah, Depdagri, sudah menindaklanjuti hal itu dan menyelenggarakan rapat mediasi beberapa kali. "Itu sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu."

KK di proyek itu dan menyerahkan kepada Grup Bintangdelapan. Perusahaan itu sudah mengeksploitasi tambang bekerja sama dengan beberapa kontraktor asal China.

"Ini tidak etis. Saya nyatakan kalau dalam seminggu tidak beres, kami akan bertemu lagi dengan Mendagri untuk menuntaskan masalah ini," tegasnya.

Proyek tambang nikel Lasamphala yang bernilai US\$2 miliar itu tergolong berkadar rendah, yaitu 0,91%-1,5% dengan kandungan nikel diperkirakan mencapai 47.000 ton.

Jalan sendiri

Berlarutnya KK Rio Tinto dan terjadinya tumpang tindih izin KP kepada Grup Bintangdelapan terjadi akibat tarik ulur negosiasi perusahaan Australia dengan pemerintah pusat. Kedua pemkab—Morowali dan Konawe—akhirnya mengambil jalan sendiri dengan mengeluarkan izin KP kepada grup dengan CEO Halim Mina. Tujuan kedua pemkab itu adalah untuk mempercepat investasi di daerah.

Berkaitan dengan tarik ulur negosiasi Rio Tinto dan pemerintah, salah satunya adalah masalah sistem perpajakan, sistem *nail down* atau *prevailing*. Rio Tinto semula meminta diberlakukannya sistem pajak *nail down* untuk Lasamphala.

Artinya, tarif pajak akan tetap sepanjang masa kontrak. Perusahaan itu menolak sistem *prevailing* yang dinilai bisa mengganggu *cash flow*.

Rio Tinto Indonesia

VS

Grup Bintangdelapan di Lasamphala

Rio Tinto Indonesia mengajukan aplikasi untuk wilayah konsesi tambang nikel di Lasamphala yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tambang nikel itu memiliki kadar 0,91%-1,5%. Kandungan nikel diperkirakan mencapai 47.000 ton.

Namun, Pemkab Morowali dan Pemkab Konawe memberikan konsesi tambang itu kepada Grup Bintangdelapan yang kerja sama dengan kontraktor China.



Perusahaan Grup Bintangdelapan di masing-masing kabupaten

Kabupaten Morowali

- PT Panca Metta (eksploitasi-1 KP)
- PT Meltapratama Perkasa (eksploitasi-2 KP)
- PT Bintangdelapan Wahana (eksploitasi-1 KP)
- PT Bintangdelapan Mineral (eksploitasi-1 KP)
- Grup Bintangdelapan (rencana 3 KP)
- PT Bintangdelapan Transsarana (rencana)

Kabupaten Konawe

- PT Meltapratama Perkasa (rencana)
- PT Panca Metta (rencana)
- PT Bintangdelapan Wahana (rencana)
- PT Bintangdelapan Mineral (rencana)
- PT Bintangdelapan Energi (rencana)

Sumber: BKPM Ket KP: Kuasa pertambangan

BISNIS/DENNY IRAWATI

ini karena sistem *nail down* sudah tidak lazim digunakan di dunia. Sistem *prevailing* yang diinginkan pemerintah menjadikan tarif pajak bisa berubah mengikuti aturan yang berlaku.

Terakhir Rio Tinto melunak dan menginginkan sistem pajak *prevailing* yang mengacu pada rezim pajak yang dikenakan kepada PT International Nickel Indonesia Tbk (Inco). Namun Lutfi mengatakan sudah ada jalan tengah antara pemerintah dan Rio Tinto soal sistem pajak itu.

"Pajak sudah tuntas. Sistem pajak penghasilan yang dipakai adalah *nail down* dengan 30% dari hasil penjualan produk akhir." (rudi.ariffianto@bisnis.co.id)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 2 TAHUN 2008	

**KKGI Eksplorasi Tambang
Batubara Kaltim**

PT Resources Alam Indonesia Tbk (KKGI) telah menghabiskan dana sebesar 645,664 ribu dolar AS untuk kegiatan eksplorasi di tiga daerah Kalimantan Timur (Kaltim). Demikian diungkapkan Sekretaris Perusahaan KKGI Luyianto Yamin, dalam laporannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (9/4). Menurut Yamin, ketiga daerah yang sedang di eksplorasi ini adalah Separi, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Gunung Pinang, di Kabupaten Kota Samarinda, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dan Dayur, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Yamin juga mengatakan, perseroan melalui anak perusahaan, PT Insani BaraPerkasa (IBP), masih akan memfokuskan eksplorasi pada daerah-daerah di dalam kontrak karya. Ia juga mengungkapkan bahwa eksplorasi di tiga daerah Kalimantan Timur ini dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktor). KKGI sebelumnya bergerak di bidang pengolahan kayu.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

MINYAK

EMP Peroleh Tambahan Minyak 3.000 BPH

JAKARTA – Manajemen PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk melalui anak usahanya Kangean Energy Indonesia Ltd menyatakan telah mengebor sumur SED-3 di lapangan minyak Sepanjang, Madura, Jawa Timur. Eksplorasi sumur SED-3 mencapai kedalaman 7.580 kaki dan ditemukan rata-rata minyak mengalir sebesar 3.000 barel per hari (bph). *Investor Relations* EMP Herwin W Hidayat di Jakarta, Rabu (9/4), mengatakan, hasil pengujian yang positif ini diharapkan mampu menunjang kinerja sumur SED-1A yang terbukti mampu memproduksi minyak hingga 3.500 bph. Sebelumnya, produksi Blok Kangean sempat terhenti sejak April hingga Mei 2007 karena masalah teknis pada *floating storage offshore* (FSO) di kapal tanker yang disewa perseroan dan telah kembali berproduksi pada akhir April 2007. (pya)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

Investasi Tambang Minim

JAKARTA (SINDO) – Sektor pertambangan dalam negeri tidak perlu khawatir dengan minimnya investasi dari investor asing.

Ketua Komite Tetap Sumber Daya Mineral dan Batu Bara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Herman Afif Kusumo mengungkapkan, kendati investasi di sektor pertambangan dalam negeri saat ini masih minim, kontribusinya tetap besar terhadap penerimaan negara.

"Investor baru belum tentu membawa keuntungan," ujar dia di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, daripada menunggu adanya investor baru masuk ke sektor pertambangan dalam negeri, lebih baik pemerintah melakukan pembenahan-pembenahan. Misalnya, melakukan

penataan di bisnis pertambangan agar para penambang melakukan *good mining practices* (penambangan yang ramah lingkungan), membayar pajak yang benar, dan membagi keuntungan yang adil.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan yang memiliki kontrak jangka panjang agar cadangan mineral dalam negeri tidak dikuras habis karena akan merugikan. Apalagi, saat ini harga komoditas pertambangan di pasaran sedang tinggi.

Dia mengungkapkan, bis-

nis pertambangan memiliki dua sisi, yaitu dapat memberikan keuntungan, tetapi bisa juga menimbulkan masalah jika prosedur dalam menjalankan bisnis tersebut tidak sesuai peraturan.

"Barang tambang itu komoditas yang tidak dapat diperbarui," kata dia. Dia mengimbau dalam melakukan penambangan jangan menggandeng investor yang skala kecil menengah untuk menanamkan investasinya, sebab akan lebih banyak mengalami kerugian daripada untung.

Dari data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan umum sebesar Rp35 triliun yang terdiri dari penerimaan dari pajak pertambangan umum sebesar Rp26 triliun dan dari peneri-

maan pajak bukan pajak (PN-BP) sebesar Rp8 triliun. Sementara untuk tahun ini, sektor pertambangan ditargetkan memberikan kontribusi untuk penerimaan negara sebesar Rp36 triliun yang terdiri dari pajak pertambangan umum sebesar Rp27 triliun, sementara dari PNPB ditargetkan sebesar Rp9,3 triliun.

Pemerintah berani menargetkan angka tersebut pasalnya saat ini harga komoditi tambang harganya sedang tinggi. Di samping itu, perusahaan-perusahaan tambang besar yang memiliki kontrak dengan pemerintah dapat meningkatkan produksinya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Reformasi Miner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, minimnya investasi pertambangan di dalam negeri disebabkan ke-

tidakpastian hukum dari pemerintah untuk menjamin kenyamanan investor di bidang ini.

Pri mendukung pernyataan bahwa keberadaan investasi dari para investor tidak terlalu memengaruhi sektor pertambangan nasional. Namun, pemerintah harus melakukan pembenahan terhadap kontrak-kontrak yang telah ada, terutama terkait masalah pembagian royalti.

Selain royalti, tambah Pri pemerintah juga harus meminta kejelasan kepada rekanan dalam hal hasil produksi yang akan diekspor dan bagian untuk menjamin kepastian pasokan untuk domestik (*domestic market obligation*). Pri menilai selama ini pemerintah tidak memperhatikan permasalahan ini sehingga dirugikan.

(ferial thalib)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2008

Impor bijih tembaga China naik 20%

SINGAPURA: China diperkirakan membutuhkan 5,4 juta ton bijih tembaga pada 2008 atau naik 20% dibandingkan dengan impor tahun lalu yang masih 4,5 juta ton.

Kenaikan volume impor itu akan menempatkan China sebagai negara importir bijih tembaga terbesar di dunia menggeser posisi Jepang yang masih berkuat pada 5,05 juta ton pada 2007.

Simon Collins, Direktur Trafigura Trading Shanghai Co, mengatakan kenaikan permintaan China itu dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, sebesar 11,4% pada 2007 yang merupakan laju perekonomian tercepat dalam 13 tahun, dan juga perbaikan kinerja industri peleburan.

Kenaikan permintaan dunia pada komoditas itu mendorong harga tembaga di London Metal Exchange naik menjadi US\$8.200 per ton pada 6 Maret.

(BLOOMBERG/LUZ)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2008

Ekspor zircon Babel meningkat

PANGKALPINANG: Ekspor zircon dari Bangka Belitung (Babel) ke berbagai negara di Asia dan Eropa terus meningkat sejalan dengan makin baiknya harga komoditas itu serta meningkatnya eksploitasi timah yang menghasilkan mineral ikutan zircon.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindagkop dan UKM Babel Abdul Rani mengatakan selama 2007 ekspor zircon mencapai 2.850 ton senilai US\$435.000.

"Ada peningkatan yang cukup signifikan dari pemasaran zircon. Kisaran peningkatannya 8%-10% setiap tahun," kata Rani, kemarin.

Zircon di Babel dari mineral ikutan timah. Komoditas ini dimanfaatkan untuk bahan produk tahan panas dan tahan goresan, pelabur keramik, pelapis jam, permata, dan kristal. (ANTARA)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T, 4

TAHUN 2008

Impor tembaga China naik tajam

SHANGHAI: Impor tembaga China tahun ini diperkirakan naik menjadi 5,4 juta ton dari tahun sebelumnya sebesar 4,5 juta ton, atau naik 20% sehingga impor komoditas itu tercatat sebagai rekor tahun ini.

Menurut Simon Collin, direktur Trafigura Trading Shanghai Co—unit grup Trafigura Beheer BV, China akan menjadi pembeli tembaga utama di dunia setelah bersama Jepang. Tahun lalu, negara membeli komoditas itu hingga 5,05 ton.

China dalam dua bulan pertama tahun ini, laporan Bea dan Cukai negara melaporkan, melakukan impor bahan baku tembaga sebesar 951.860 ton, sementara Jepang hanya 746.570 ton. (Bloomberg/th)

Impor tembaga China
(juta ton)

Ket : *) Prediksi

Sumber: Trafigura Beheer BV
BISNIS/FITRIYANA PULLUNGAN

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: R. 1

TAHUN 2008

Transportasi hambat ekspor batu bara di Lahat

BISNIS INDONESIA

LAHAT, Sumsel: Kendala transportasi, terutama akses jalan kabupaten dan jalan perkebunan dinilai menghambat kegiatan ekspor batu bara perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lahat.

Dirut PT Batubara Lahat (BL) Andi Asmara mengungkapkan perusahaan hanya dapat menggunakan truk bermuatan tujuh ton akibat kondisi jalan yang tidak memadai.

Hal itu, lanjutnya, kegiatan ekspor tidak maksimal karena BL memproduksi sebanyak 20.000 ton batu bara per bulan.

"PT BL sendiri berniat membangun sebuah *bond conveyor* (jembatan berjalan) dari lokasi tambang ke Tanjung Pinang di tepi Sungai Lematang. Itu bisa menghemat jarak sekitar 40 km dan bisa menggunakan *dump truck* bermuatan 25 ton," ujarnya.

Dia mengatakan itu seusa proses ekspor perdana yang dilepas langsung bersama Bupati Lahat Harunata Selasa pekan ini.

Dia menambahkan saat ini perusahaan menyiapkan se-

Potensi batu bara di Kab. Lahat	
Luas lahan	Deposit
31.000 hektare	2,9 miliar ton
3.000 hektare *	2,2 juta ton

Sumber: Pemkab
Ket: *) Sudah digarap

banyak 125 truk pengangkut agar batu bara yang dihasilkan bisa terangkut ke dermaga di Palembang.

PT BL melakukan ekspor perdana batu bara sebanyak 8.000 ton ke Thailand dari lokasi penambangan di Desa Sukamarga, dan Muara Temiang Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat.

Perusahaan menjual batu bara tersebut melalui dua pembeli, yakni PT Servo Buana Resources untuk ekspor, dan PT Sinar Musi Jaya untuk pasar lokal.

Batu bara itu diangkut menggunakan truk bermuatan tujuh ton ke Palembang menempuh jarak 240 km. Di Palembang, batu bara ini dikapalkan melalui dermaga milik Zeni Tempur (Zipur) menggunakan dua tongkang.

"PT BL menjual batu bara

tersebut melalui dua pembeli, yakni PT Servo Buana Resources untuk ekspor, dan PT Sinar Musi Jaya untuk pasaran lokal," kata Dirut PT BL Andi Asmara.

Bupati Lahat Harunata mengatakan potensi batu bara Lahat mencapai 31.000 hektare dengan deposit kandungan sekitar 2,9 miliar ton. Dari total areal yang ada, hanya 3.000 hektare yang digarap oleh PT Bukit Asam (PTBA) di daerah Banjarsari dengan produksi 2,2 juta ton.

Dia menjelaskan perlu waktu sedikitnya 450 tahun untuk bisa menikmati hasil dari sumber daya alam (SDA) yang ada.

Hal itu, lanjutnya, menjadi alasan Pemkab untuk memberikan kuasa pertambangan kepada lima perusahaan baru selain PTBA.

PT BA sendiri disiapkan 14.100 hektare dan telah dibagi ke perusahaan swasta sekitar 3.900 ha. "Inilah kemudian sempat dipermasalahkan PT BA dan masih belum selesai. Maksud kami, semua SDA itu karunia Tuhan. Mari kita berbagi," kata Bupati. (K20)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T. 9

TAHUN 2008

Pembahasan RUU Minerba alami *deadlock*

Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Rancangan undang-undang mineral dan batu bara (RUU minerba) dipastikan tidak tuntas pada April yang dipicu oleh deadlock politis terutama masalah perubahan materi kontrak karya.

Anggota Komisi VII DPR F-PAN Alvin Lie mengatakan persoalan yang menjadi ganjalan serius tidak hanya masalah aturan peralihan. Bahkan, dia mengungkapkan di dalam batang tubuh pun terdapat friksi-friksi di kalangan fraksi DPR terkait dengan kepentingannya masing-masing.

Dia mencontohkan fraksinya yang *ngotot* untuk menolak masih diberlakukannya kontrak karya setelah penetapan RUU menjadi UU, yang seharusnya diubah 100% perizinan. Selain itu, katanya, pihaknya juga meminta adanya kejelasan pemberian hak tertentu bagi BUMN dan perusahaan nasional dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan di Tanah Air.

"Jadi masalah yang ter-

jadi bukan soal teknis semata, melainkan *deadlock* politis. Penyelesaian untuk itu bisa berujung pada voting di paripurna," tuturnya kemarin.

Alvin mengatakan hingga kini fraksi-fraksi di komisi VII yang terlibat dalam Panja dan Pansus RUU Minerba sedang mengupayakan jalan tengah untuk mengatasi kebuntuan tersebut. "Termasuk jalan yang sedang dicari adalah apa saja yang kemungkinan akan di-voting nanti."

Anggota Komisi VII DPR F-PDIP Effendi Simbolon mengaku penyelesaian RUU Minerba sebenarnya sudah sangat terlambat. Sekalipun beralasan akan masuknya masa reses, Effendi

Materi Minerba yang jadi friksi

- Masalah aturan peralihan
- Soal perizinan yang harus diubah
- Kewenangan pusat daerah
- Hak BUMN/perusahaan nasional
- Peningkatan mutu hasil tambang
- Soal kepedulian lingkungan
- Sanksi terhadap pelanggaran tambang

Sumber : Diolah

BISNIS/ADI PURDIYANTO

62

mengakui ada perbedaan prinsip, terutama mengenai penerapan rezim perizinan atau kontrak karya yang diatur dalam pasal peralihan.

"Tapi masalahnya tidak sekedar teknis, itu prinsip bagaimana kita mengamankan aset negara," tegasnya.

Di tempat terpisah, Herman Afif Kusumo, Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia yang juga Ketua Komite Tetap Sumberdaya Mineral dan Batu bara Kadin berpendapat RUU Minerba memang tidak membuat semua pihak senang dan puas.

Perusahaan asing

Bahkan, dia mengisyaratkan adanya pihak-pihak yang takut RUU Minerba itu disahkan di balik kebuntuan yang terjadi.

"Kalau bagi perusahaan nasional, baik *existing* maupun baru mungkin tidak masalah. Tapi untuk perusahaan asing memang kemungkinan ada ketakutan semacam itu," tuturnya.

Secara umum, tuturnya, RUU Minerba sangat memihak kepentingan nasional bahkan cenderung 'nasionalis'. Namun, dia membantah apabila RUU

itu menghalang-halangi investor asing yang akan masuk.

"Bahkan selain nasionalis, RUU ini juga liberal karena membuka pintu lebar-lebar bagi asing untuk masuk hingga ke KP [kuasa pertambangan]. Tapi yang pasti *kan* UU itu normatif dan bisa dibahas bersama dalam PP-nya."

Dia memprediksikan pembahasan RUU tersebut akan tuntas sebelum Agustus atau masa sidang berikutnya. "Saya yakin itu kalau semua pihak mendukung. Yang menjadi masalah adalah soal pemahaman, butuh penyamaan persepsi dengan dilakukan sinkronisasi." (*rudi.arifianto@bisnis.co.id*)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2008

RI seen as risky investment for miners

Andi Haswidi
The Jakarta Post/Singapore

A panel of speakers at the fourth Asian Mining Congress in Singapore said Indonesia was still perceived as high-risk to current and potential industry investors.

There were three main points of concern raised during the discussion. The first was the negative impacts of decentralization, which has caused an overlapping of authority with the central government and the local government.

Discussed second was the amendment process of mining law, which started in early 2005. Finally, unclear forestry regulation, particularly on the

division of production and protected land, was raised.

"A consequence of the new mining laws essentially is the current working contract arrangement will be replaced by a new permit system," said Gavin MacLaren, a managing partner at the law firm Allens Arthur Robinson.

According to the mining bill, the new permit will give investors a maximum operations tenure of 20 years, which is 10 years less than the period offered under the working contract mechanism.

The bill also says all mining companies must develop minerals locally, making smelters necessary capital. It also stipulates if permit holders violate certain rules, the government has the right

to revoke their permit, which is not regulated under the current working contract arrangement.

"It would be fair to say the upcoming law provides less security and stability," MacLaren said.

He also said it was not clear whether the existing working contracts would "grandfather" the new permit system, mood and approach, adding the entire industry would depend on that decision.

He warned if the House endorsed the bill as planned this year, it might take a considerable period of time to implement the new system and for the industry to become comfortable with the changes, resulting in delayed operations and developments.

A speaker from the World Bank's International Finance Corporation (IFC), Karsten Fuelster, confirmed it was likely the lack of investor confidence in Indonesia would continue.

His opinion is also reflected in the government's forecast on new investments in the mining sector, which is expected to grow only by 2.5 percent this year to US\$1.35 billion, predicting investors were likely to place their plans on hold until the new law comes out.

As most developing countries, including Indonesia, had shares in the IFC, Fuelster said the IFC could easily access the government and advise investors prior to making decisions.

He said the main goal of the IFC was to promote development through private investment in developing nations, so such advice benefited both the investors and the country in need of investment.

To support such an endeavor, the World Bank also provides insurance to cover liabilities over risks through the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

MIGA's acting global head for oil, gas, mining and chemical sectors, Mamadou Barry, said about 90 percent of respondents surveyed attributed investing concerns to political instability in developing countries, such as Indonesia,

Risks facing investors in developing countries, he said,

included nationalization, confiscation, discriminatory government action and breach of contract.

"The trend of decentralization has also created potential distress as it demands a greater share of company revenue," Barry said.

Following the Asian financial crisis, he said, MIGA had to pay \$15 million to a client due to the cancellation of its investment plans in Indonesian electricity plants. The plans fell through due to government financial constraints.

He said MIGA did not only covers losses. "As part of the World Bank Group, we give a deterrent to harmful government actions and are able to mediate disputes."

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR **APR** MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2008

Gudang Timah di Singapura Lebih Efisien

JAKARTA – PT Timah Tbk menilai, keberadaan gudang penyimpanan di Mentok, Singapura, lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Sebab, 95% total kapasitas produksi perseroan dipasarkan ke luar negeri.

Selama ini BUMN timah tersebut mempunyai pusat gudang di Bangka Belitung dan Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal sebesar 5%. "Kami melihat tidak mungkin satu kapal hanya mengangkut timah untuk tujuan ekspor ke satu negara," kata *Corporate Secretary* Timah Abrun Abubakar kepada *Investor Daily* di Jakarta, pekan ini.

Sebelumnya, Sekretaris Meneg BUMN Said Didu mengimbau agar manajemen Timah merelokasi gudang penyimpanan timah di Singapura ke Indonesia sebagai langkah efisiensi. Selain itu, relokasi tersebut diharapkan dapat membentuk harga acuan timah di dalam negeri.

Menurut Abrun, keberadaan gudang transit di Singapura memang sangat diperlukan. Relokasi gudang dari Singapura ke Indonesia justru menyulitkan proses pemasaran

kepada pembeli asing. Pasalnya, Timah harus menambah biaya pengangkutan dari lokasi tambang ke gudang di lokasi lain. "Justru kalau harus membangun kembali gudang baru di Jakarta atau di kota lain, hal tersebut akan menambah biaya angkut," tandas dia.

Mengenai tarif sewa gudang, ia enggan mengungkapkan berapa nilainya. Namun, ia memastikan manajemen perseroan sudah memperhitungkan secara teknis bahwa kegiatan pengangkutan timah jauh lebih efisien bila gudang berada di Singapura.

Negara tujuan utama ekspor perseroan di Asia adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok. Sedangkan negara Eropa meliputi Inggris, Belanda, Spanyol, dan Italia.

Sementara itu, laporan Cushman & Wakefield menunjukkan, Singapura merupakan negara dengan biaya sewa kawasan industri termahal di Asia. Bahkan harga rata-rata sewanya mampu mengalahkan Hong Kong. Rata-rata harga mencapai US\$ 1,70 *per square foot* per bulan, naik 16% dibandingkan tahun lalu. (shd)

64

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Harga Emas Bisa Tembus US\$ 1.200 per Troy Ounce

PARA investor yang masih menyimpan emas batangan sebaiknya tak buru-buru menjualnya. Sebab, seperti dikutip *Bloomberg*, kemarin, para peneliti GFMS Ltd, konsultan emas, perak dan platina terbesar, menyatakan bahwa banyaknya orang yang membeli perhiasan akan menjaga harga emas untuk tidak turun di bawah US\$ 800 per *troy ounce* - US\$ 900 per *troy ounce*.

Tahun ini, harga emas telah naik hingga 8,7%. Harga emas bahkan sempat menembus US\$ 1.032.70 per *ounce* pada 17 Maret lalu. "Kami memperkirakan harga emas bisa mencapai US\$ 1.100 hingga US\$ 1.200 per *troy ounce*," kata Philip Klapwijk, Direktur Eksekutif GFMS, dua hari lalu (8/4).

Dalam laporannya, GFMS juga menyebutkan bahwa jumlah investasi emas di seluruh dunia telah menurun hingga 61%. Kini, Jerman adalah pasar investasi emas terbesar di Eropa. Sedangkan posisi kedua dan ketiga ditempati Swiss dan Austria. Meski begitu, tahun lalu, permintaan emas dari konsumen naik 51% menjadi 2.401 ton.

Diade Riva Nugrahani

65

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

EMAS

Oxiana Masih Menanti Izin Eksploitasi Martabe

JAKARTA – Perusahaan tambang asal Australia, Oxiana Resources Ltd, masih menanti izin dari pemerintah Indonesia untuk mengeksploitasi tambang Martabe senilai Aus\$ 310 juta di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon Felix Sembiring kepada *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (9/4) malam mengatakan, saat ini izin penambangan emas Oxiana di Martabe masih dalam proses. "Kapan selesainya belum pasti, secara prinsip tidak ada yang bermasalah," ujarnya. Tambang Martabe yang berada di dalam kawasan hutan lindung itu diperkirakan menghasilkan 200 ribu ons emas dan dua juta perak per tahun, dengan masa produksi sekitar sembilan tahun. Oxiana berharap proses desain tambang, perizinan akan segera turun tahun ini. Namun, Undang-Undang Kehutanan Indonesia melarang pembukaan tambang terbuka di hutan lindung, dan investor diharuskan memiliki izin dari menteri kehutanan guna pembersihan lahan pelaksanaan proyek. Oxiana dikabarkan mengeluarkan dana Aus\$ 280 per ons untuk penambangan emas di Martabe, yang dijadwalkan beroperasi pada Desember 2009. (her)